



PELUANG DAN TANTANGAN RENCANA PENGHAPUSAN KUOTA IMPOR INDONESIA

Muhammad Zakik Abidin* dan Sulasi Rongiyati**

Abstrak

Pemerintah berencana menghapus kuota impor terhadap komoditas strategis untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha. Penghapusan kuota impor berpotensi memberikan dampak terhadap aktivitas perdagangan serta dunia usaha di Indonesia. Tulisan ini membahas peluang dan tantangan rencana penghapusan kuota impor serta upaya optimalisasi kebijakan impor agar mendukung ekonomi nasional. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan efisiensi perdagangan, mencegah praktik rent seeking dan monopoli, meningkatkan partisipasi pelaku usaha, serta menurunkan harga komoditas. Namun, apabila tidak diimbangi dengan perlindungan industri domestik, kebijakan ini dapat melemahkan pelaku usaha lokal, meningkatkan pengangguran, menurunkan daya saing, serta mengganggu kemandirian ekonomi nasional. Oleh karena itu, optimalisasi kebijakan impor perlu dirancang dengan baik agar dapat menjaga keseimbangan neraca perdagangan, menguatkan daya saing nasional, serta mendukung kemandirian sektor strategis. Komisi VI DPR RI perlu memastikan penyusunan kebijakan impor oleh Kementerian Perdagangan dan instansi terkait dilakukan secara komprehensif dan inklusif, serta mengawasi pelaksanaannya agar tetap mendukung industri domestik dan selaras dengan kepentingan nasional.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia berencana menghapus kuota impor terhadap komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Rencana ini disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam acara Sarasehan Ekonomi pada 8 April 2025. Presiden telah menginstruksikan untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan. Kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi dan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha (BPMI Sekretariat Presiden, 2025). Menindaklanjuti rencana tersebut, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan tengah melakukan kajian menyeluruh terhadap kapasitas produksi dan kebutuhan nasional. Komoditas yang masuk dalam evaluasi penghapusan kuota impor antara lain garam, gula konsumsi, dan daging, serta peluang penghapusan kuota impor untuk kapas dan benang (Salim, 2025).

Secara yuridis Indonesia telah meratifikasi General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: muhammad.abidin@dpr.go.id

**) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: sulasi.rongiyati@dpr.go.id

Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Sebagai anggota WTO, Indonesia terikat untuk tidak menerapkan pembatasan impor melalui kuota, kecuali dalam kondisi tertentu, seperti menjaga stabilitas ekonomi, mengatasi defisit neraca pembayaran, atau melindungi industri dalam negeri dari lonjakan impor.

Penghapusan kuota impor merupakan bagian semangat deregulasi untuk memperlancar arus perdagangan dan sebagai bentuk antisipasi terhadap risiko ketegangan perdagangan internasional agar perekonomian nasional tetap adaptif dan terbuka. Tulisan ini membahas peluang dan tantangan rencana penghapusan kuota impor yang dapat berdampak terhadap aktivitas perdagangan, serta upaya optimalisasi kebijakan impor agar tetap mendukung ekonomi nasional.

Peluang dan Tantangan Penghapusan Kuota Impor Sektor Perdagangan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyatakan, penghapusan kuota impor dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia serta menyederhanakan tata kelola perizinan yang berbasis teknologi informasi, menekan biaya, dan mempercepat waktu proses logistik (Daniswari, 2025). Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung optimisme pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah dan Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 masing-masing 5,2 persen dan 4,8 hingga 5,6 persen. Sementara *Chief Economist* PT Bank Syariah Indonesia memperkirakan ekonomi domestik akan tumbuh antara 5,1 hingga 5,2 persen di tengah ketidakpastian global pada tahun 2025 (Faizal, 2025).

Sejalan dengan upaya strategis pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha, penghapusan kuota impor berpotensi memberikan manfaat positif bagi perdagangan Indonesia. *Pertama*, implementasi kebijakan impor bebas dapat mencegah terjadinya praktik *rent seeking*, yakni upaya dari kelompok tertentu untuk memperoleh keuntungan ekonomi sebesar mungkin dengan usaha seminimal mungkin (Choirul, 2025). *Kedua*, penghapusan kuota impor berpotensi membuka kesempatan kepada seluruh pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional, sehingga mereka dapat bersaing secara terbuka untuk melakukan impor. *Ketiga*, dibukanya keran impor dapat memberikan manfaat untuk masyarakat terutama harga komoditas yang cenderung akan semakin murah akibat masuknya produk impor tanpa batasan. Apabila kuota impor dibatasi, terutama jauh di bawah defisit antara penawaran dan permintaan komoditas yang dihasilkan dalam negeri, maka harga komoditas tersebut berpotensi meningkat. *Keempat*, dalam jangka pendek, kebijakan ini berpotensi meminimalisasi praktik perburuan rente dan monopoli yang terjadi di kalangan importir (Agustine, 2025). Penguasaan distribusi komoditas pangan impor oleh sejumlah kecil kelompok pelaku usaha sektor pangan dapat menyebabkan konsumen harus membayar harga yang lebih mahal, akibat minimnya transparansi dalam mekanisme pengajuan impor (Amalia, 2025).

Meskipun rancana penghapusan kuota impor dinilai strategis, kebijakan ini berisiko menghadapi tantangan. Jika kebijakan penghapusan kuota impor tidak disertai dengan

langkah dan pengawasan yang tepat, dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak negatif. *Pertama*, pelaku usaha terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), termasuk sektor pertanian, berpotensi mengalami tekanan, mengingat tingkat produktivitas dalam negeri yang masih relatif rendah. Dalam jangka panjang, apabila penghapusan kuota impor diartikan sebagai pembukaan keran impor secara besar-besaran, maka berisiko mengganggu keberlangsungan UMKM di Indonesia karena pasar domestik akan dibanjiri oleh produk-produk dari luar negeri (Agustine, 2025). *Kedua*, apabila keran impor dibuka tanpa batas, dikhawatirkan terjadi tekanan terhadap industri padat karya terutama tekstil, alas kaki, dan elektronik, yang berisiko terjadi peningkatan pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (Widiyanto, 2025). *Ketiga*, komoditas impor terutama produk murah berpotensi lebih mudah masuk ke pasar domestik, sehingga kurang kompetitif dengan harga produk dalam negeri (Widiyanto, 2025). *Keempat*, menurut Syafruddin Karimi, Dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas, penghapusan kuota impor terutama terhadap komoditas strategis seperti gula, beras, dan kedelai, berisiko kurang mendukung tujuan utama swasembada pangan. Swasembada pangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam negeri secara mandiri tanpa ketergantungan berlebihan pada negara lain. Kebijakan ini dikhawatirkan dapat mengganggu ekosistem pertanian, seperti petani kehilangan insentif untuk memproduksi, pasar domestik dibanjiri produk impor, dan harga komoditas lokal mengalami penurunan (Al Hasan, 2025).

Upaya Optimalisasi Kebijakan Impor Indonesia

Kebijakan impor Indonesia perlu dirancang secara strategis dengan mempertimbangkan keseimbangan neraca perdagangan guna menjaga posisi surplus dan menjamin kestabilan cadangan devisa nasional. Dalam kerangka ini, impor sebaiknya dipandang sebagai solusi jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan atas barang-barang yang belum dapat diproduksi di dalam negeri. Dalam jangka panjang, kebijakan impor harus diarahkan pada upaya peningkatan kapasitas produksi domestik, terutama di sektor-sektor strategis guna mewujudkan kemandirian nasional. Di sektor pangan dan energi, pelonggaran kebijakan impor diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga tidak membebani daya beli masyarakat dan tidak menambah tekanan fiskal bagi pemerintah (Alfiandana, 2025).

Kebijakan impor juga perlu memperhatikan daya tahan ekonomi dengan tata kelola yang kuat, adaptif, dan berorientasi jangka panjang. Ketergantungan Indonesia saat ini pada ekspor komoditas mentah dan produk bernilai tambah rendah membuat Indonesia masih rentan terhadap tekanan global. Oleh karena itu, penguatan daya saing nasional harus menjadi prioritas, melalui percepatan inovasi industri, efisiensi logistik, konsistensi fiskal, serta kepastian hukum dan regulasi bagi pelaku usaha.

Selain itu, pemerintah bersama pelaku usaha tidak boleh menggantungkan impor hanya pada satu negara, mengingat semakin kompleksnya kebutuhan terhadap produk barang dan jasa serta eratnya keterkaitan dalam rantai pasok global (Alfiandana, 2025). Oleh karena itu, diplomasi ekonomi harus digiatkan, baik dalam forum bilateral maupun multilateral dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan berlandaskan pada semangat kemandirian serta keberpihakan terhadap kepentingan nasional.

Penutup

Rencana penghapusan kuota impor oleh pemerintah Indonesia berpotensi memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional, seperti meningkatkan efisiensi perdagangan, mencegah praktik *rent seeking* dan monopoli, meningkatkan partisipasi pelaku usaha, serta menurunkan harga komoditas. Namun di sisi lain, jika kebijakan ini diterapkan tanpa langkah dan pengawasan yang ketat dapat berisiko negatif terhadap ekonomi domestik Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan impor harus dirancang secara hati-hati dengan mempertimbangkan keseimbangan perdagangan dan perlindungan terhadap sektor strategis dalam jangka panjang. DPR RI melalui Komisi VI perlu memastikan bahwa Kementerian Perdagangan dan instansi terkait menyusun peta jalan rencana penghapusan kuota impor secara komprehensif dan inklusif. Selain itu, Komisi VI DPR RI juga perlu mengawasi pelaksanaan kebijakan impor Indonesia agar tetap berpihak pada kepentingan nasional dan keberlangsungan industri dalam negeri.

Referensi

- BAGustine, J. (2025, April 14). Penghapusan kuota impor berpotensi mengancam ketahanan ekonomi pelaku UMKM. *Universitas Gadjah Mada*. <https://ugm.ac.id/id/berita/penghapusan-kuota-impor-berpotensi-mengancam-ketahanan-ekonomi-pelaku-umkm/>
- Alfiandana. (2025, April 13). Dampak kuota impor dihapus oleh pemerintah, ada manfaat positif dan risiko negatifnya. *Voi.id*. <https://voi.id/en/economy/474304>
- Al Hasan, A. (2025, April 10). Dosen Andalas nilai kebijakan hapus kuota impor bisa runtuhkan ekosistem pertanian hingga ketahanan pangan. *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/dosen-andalas-nilai-kebijakan-hapus-kuota-impor-bisa-runtuhkan-ekosistem-pertanian-hingga-ketahanan-pangan-1229485>
- Amalia, Y. (2025, April 9). Ternyata ada dampak positif kebijakan Prabowo hapus kuota impor daging, begini penjelasannya. *Merdeka.com*. <https://www.merdeka.com/uang/ternyata-ada-dampak-positif-kebijakan-prabowo-hapus-kuota-impor-daging-begini-penjasannya-372512-mvk.html?page=2>
- BPMI Sekretariat Presiden. (2025, April 8). Presiden Prabowo perintahkan penghapusan kuota impor. *Kementerian Sekretariat Negara*. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_perintahkan_penghapusan_kuota_impor
- Choirul, D. (2025, April 9). Apindo ungkap sisi positif dan negatif jika kuota impor dihapus. *Jawapos.com*. https://www.jawapos.com/ekonomi/01_5857849/apindo-ungkap-sisi-positif-dan-negatif-jika-kuota-impor-dihapus
- Daniswari, D. (2025, April 9). Penghapusan kuota impor diharapkan mempercepat pertumbuhan ekonomi. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/04/09/104542888/penghapusan-kuota-impor-diharapkan-percepat-pertumbuhan-ekonomi>
- Faizal, M. (2025, Januari 15). Mendorong pertumbuhan di tengah tantangan dan ketidakpastian. *Sindonews.com*. <https://scope.sindonews.com/artikel/531/mendorong-pertumbuhan-di-tengah-tantangan-dan-ketidakpastian>

- Salim, H.J. (2025, April 10). Mengenal kuota impor dan dampaknya bagi perekonomian Indonesia. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/5990301/mengenal-kuota-impor-dan-dampaknya-bagi-perekonomian-indonesia?page=3>
- Widiyanto, S. (2025, April 14). Dihapus kuota impor risiko besar mengancam. *Koran Pikiran Rakyat*. <https://koran.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-3039238013/dihapus-kuota-impor-risiko-besar-mengancam?page=all>

